

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi terjadi sangat pesat di seluruh dunia terutama pada negara-negara berkembang khususnya Asia termasuk negara Indonesia. Kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan di berbagai bidang terutama dalam bidang industri dan organisasi. Secara umum ada tiga jenis organisasi di Indonesia yakni organisasi pemerintah, perusahaan multinasional dan perusahaan swasta (Greenberg dan Baron, 1997). Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui peran lingkungan internal dan eksternal dimana lingkungan internal menciptakan milieu kultural dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya, dan lingkungan eksternal yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Perubahan organisasi bersifat terbuka karena organisasi berinteraksi dengan lingkungan secara erat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap dinamika perubahan yang terjadi harus diimbangi dengan kualitas organisasi yang mumpuni. Dengan demikian kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung salah satunya pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Organisasi yang baik harus ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik pula sehingga mampu melakukan upaya-upaya guna meningkatkan mutu dan kualitas sehingga nantinya akan dapat memegang kendali penuh dalam mengoperasikan jalannya organisasi sesuai dengan perubahan-perubahan global yang terjadi.

Sumber daya manusia tetap merupakan komponen yang paling penting dalam kemajuan teknologi di bidang industri maupun organisasi karena faktor sumber daya manusia tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Oleh karenanya, pengembangan organisasi harus disertai dengan pengembangan dan pembinaan kemampuan tenaga kerja agar tetap mampu bersaing dengan organisasi lain dan mengikuti alur kemajuan teknologi yang terjadi.

Salah satu organisasi besar di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan dinamika aktivitas masyarakat yang terjadi adalah instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dimana kehadiran dan tindakan Polri menjadi hal penting yang diperlukan oleh masyarakat. Pembangunan dan peningkatan instansi Polri sebagai instansi yang bertanggungjawab di bidang keamanan negara mempunyai suatu kekhasan tersendiri, karena Polri mempunyai moto *Rastra Sewakottama* yang artinya *Abdi Utama bagi Nusa Bangsa*, yang mana hal ini berarti Polri tidak bisa lepas dari seluruh kegiatan, kejadian dan peristiwa yang ada di Indonesia seperti yang telah diatur dan dicantumkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2002 yang telah diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri pada tanggal 01 Juli 1954 sebagai hari lahirnya instansi Polri. Polri mengemban tugas-tugas pokok Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu asas legalitas dimana dalam melaksanakan

tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum, asas kewajiban yang merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum, asas partisipasi dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat, asas preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat, serta asas subsidiaritas yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan tugas. Dari pedoman inilah kemudian lahir kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah strategis memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Anggota Polri tentu harus memiliki kemampuan produktivitas yang tinggi agar mampu menghadapi setiap dinamika perubahan dan permasalahan maupun peristiwa yang terjadi pada seluruh aspek masyarakat maupun negara serta untuk peningkatan perkembangan pada instansi Polri itu sendiri. Produktivitas juga mempunyai kaitan yang erat dengan keinginan atau kemauan seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Menurut Siagian (2003:154) Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Menurut Siagian (2003:154) Produktivitas

adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Produktivitas kerja merupakan suatu masalah yang harus mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan, karena peningkatan produktivitas kerja karyawan tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada usaha dan peran serta baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. Peningkatan kualitas kemampuan serta produktivitas anggota dapat ditingkatkan dengan mengikuti serangkaian program pelatihan, program peningkatan kemampuan, pendidikan umum maupun pendidikan Kepolisian seperti pendidikan kejuruaan, pendidikan dan pengembangan spesialisasi, dan pelatihan maupun program-program lainnya.

Anggota Polri juga dituntut untuk dapat menjalankan tugas dengan sempurna, sigap, cepat, tanggap dan tepat dalam pengamanan maupun dalam memberikan tindakan kepolisian atau bisa disebut dengan Diskresi Kepolisian (Pasal 18 UU Kepolisian). Selain itu, anggota Polri juga harus peka terhadap keadaan lingkungan dan menjadi garda terdepan untuk melakukan tindakan-tindakan preemtif, preventif dan respresif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia. Dilihat dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tingkat produktivitas serta aktivitas masyarakat Yogyakarta terus mengalami dinamika perubahan yang cukup fluktuatif, sehingga menjadi perhatian khusus bagi lembaga terkait terutama Polri karena dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mungkin saja akan

memberikan dampak pada peningkatan kerawanan maupun tindak kriminal yang terjadi.

Untuk itu setiap anggota Polri harus dapat bertindak se-efisien mungkin agar dalam pelaksanaan tugas tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dan permasalahan dapat segera diatasi. Anggota Polri harus mampu menyesuaikan diri dalam segala bidang, situasi dan permasalahan agar dapat mengikuti setiap perubahan seiring dengan perubahan yang ada di masyarakat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI tentang perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI.

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dan analisis data dengan Kasubbagrenmin Biro Operasi (Ro Ops) Polda DIY, Kabidhumas (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat) Polda DIY, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DIY dan laporan data kejadian kamtibmas tahunan oleh Staf Asisten Bidang Operasi Polri (Sops) Biro Pengendalian Operasi (Ro Dalops) Mabes Polri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka kejadian atau laporan polisi secara keseluruhan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terus mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan di wilayah hukum Polda D. I. Yogyakarta.

Secara keseluruhan situasi kamtibmas pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 untuk jumlah kejadian kriminalitasnya. Tercatat, total kejadian kriminalitas pada tahun 2018 berjumlah 5.013 kejadian, angka ini naik 4,55% dibanding pada tahun 2017 yang berjumlah 4.795 kejadian. Namun jika dilihat dari penyelesaian kejadian kriminalitas, tahun 2018 mengalami

penurunan sebanyak 10,45% menjadi 2.357 kejadian dari 2.632 penyelesaian kejadian kriminalitas pada tahun 2017. Pada tahun 2018 total kejahatan yang diterima melalui laporan polisi sebanyak 5.046 laporan dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 di angka 4.292 laporan. Begitupun terkait jumlah laporan polisi yang terselesaikan mengalami peningkatan 17,73% atau naik 418 kasus dari tahun lalu 2018.

Laporan Kejahatan Turun 14,94% pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2.775 dari jumlah laporan kejahatan pada tahun 2018 yakni 2.357 kasus. Kasus terbanyak di tahun 2019, baik berupa laporan maupun pengusutan adalah dari kasus penipuan sebanyak 795 laporan, disusul dengan pencurian biasa 515 laporan, narkoba sebanyak 499 laporan, pencurian berat (curat) sebanyak 182 laporan, dan curanmor sebanyak 364 laporan. Selanjutnya, mengalami kenaikan 18 kasus atau 3,74% di tahun 2019 dari 481 kasus pada tahun 2018 menjadi 499 kasus. Kejadian kecelakaan lalu lintas tahun 2018 sebanyak 4.275 kasus mengalami kenaikan sebesar 1.106 kasus atau 25,87% menjadi 5.381 kasus di tahun 2019. Korban meninggal mengalami penurunan 1,22% dari sebanyak 407 orang meninggal pada tahun 2018 menjadi sebanyak 402 orang.

Gangguan kamtibmas di pada tahun 2020 kembali mengalami mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk perbandingan dengan gangguan kamtibmas tahun 2019, terdapat kenaikan dari gangguan kamtibmas sebanyak 9,18% dan dalam penyelesaian perkara naik sebanyak 57,96%. Gangguan kamtibmas Polda DIY ada 356 kasus dengan penyelesaian perkara 276 kasus. Kasus yang banyak terjadi di wilayah hukum Polda DIY yaitu narkoba sebanyak

244 kasus, curat 178 kasus, curanmor 100 kasus, curas 35 kasus, aniaya berat 14 kasus, perkosaan 9, pembunuhan 7 dan kebakaran 13 kasus. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 2.365 dengan korban meninggal sebanyak 169 orang.

Berdasarkan data diatas, peningkatan maupun penurunan angka kejadian kamtibmas yang terjadi disebabkan oleh beberapa aktivitas masyarakat antara lain aksi-aksi demonstrasi baik dalam bentuk aksi solidaritas maupun aksi tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, peringatan hari besar nasional, pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah, perayaan hari raya keagamaan yang identik dengan kegiatan di tempat-tempat ibadah maupun arus mudiknya, serta aktivitas keseharain masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Banyaknya bentuk aktivitas masyarakat yang memerlukan kehadiran anggota Polri untuk membantu memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mempengaruhi kemampuan anggota polri dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Produktivitas yang dimiliki oleh setiap anggota Polri haruslah selalu ditingkatkan agar mampu mengimbangi banyaknya aktivitas masyarakat mengingat jumlah anggota Polri yang sampai saat ini masih terbatas jika dibandingkan dengan tingginya ritme dinamika di masyarakat setiap tahunnya.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Polisi asep Suhendar (Kapolda DIY) pada jumpa pers yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember tahun 2019 di Polda DIY menyatakan bahwa situasi kamtibmas dan permasalahan aktual yang terjadi di Yogyakarta terus berkembang dan berubah.

Demikian pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Bimo Anggoro Seno (Wakapolda DIY) pada tanggal 28 Desember 2018 mengatakan bahwa, “secara keseluruhan situasi kamtibmas masih kondusif, tapi catatan di mana jumlah kejadian meningkat namun penyelesaian justru menurun, harus menjadi pembelajaran bagi kami”. Brigjen Pol Bimo juga menambahkan, “Idealnya, tiap tahun memang kita harusnya bisa menyelesaikan kasus di atas 50% dari total kasus. Tahun 2017 lalu, kita sudah melebihi 50%, tapi sayang tahun ini justru tidak sampai 50%. Semoga dengan berbagai upaya perbaikan nantinya, tahun depan Polda DIY bisa lebih baik lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, anggota Polda DIY masih perlu meningkatkan kemampuan produktivitasnya melalui beberapa kegiatan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi seperti pendidikan kejuruan, pelatihan, seminar dan program peningkatan kemampuan yang lain agar dapat melakukan tugasnya dengan efisien sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dan mengatasi permasalahan yang terjadi dengan cepat dan tepat. Ini dimaksudkan agar anggota Polisi dalam melaksanakan tugasnya mampu menggunakan waktu yang singkat, menggunakan biaya operasional yang terjangkau, menggunakan jumlah tenaga kerja yang sedikit dan memberikan hasil pelaksanaan tugas yang optimal. Diharapkan juga, bahwa target-target operasional dapat terpenuhi dengan maksimal dalam kurun waktu tertentu dan tidak mengalami *over budget*, *over time*, dan *over process*. Menurut Brigjend Pol Bimo, keberhasilan tugas Polda DIY tidak pernah terlepas dari peran aktif seluruh elemen masyarakat, media massa, dan rekan-rekan kalangan Humas dari instansi

lainnya. Karena itu, Polda DIY menaruh harapan besar untuk selalu mendapat dukungan terkait tugas-tugas kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Brigjend Pol Bimo dalam konferensi persnya bersama dengan perwakilan dari Pemda DIY. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan erat yang saling terkait antara anggota Polri dengan masyarakat yang tentunya harus terus melakukan perbaikan dan peningkatan produktivitas maupun mutu dari anggota Polri itu sendiri sehingga setiap permasalahan maupun gangguan kamtibmas yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan hasil yang maksimal. Mengingat akan selalu terjadi perubahan pada setiap tahunnya yang harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas anggota Polri yang semakin baik. Sehingga dalam hal ini, tingkat produktivitas anggota Polri memiliki peranan penting yang harus selalu ditingkatkan.

Martoyo (2000) menyatakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan antara lain motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi dan berbagai aspek ekonomis perilaku lainnya. Menurut Panji dan Anoraga (Nimas, 2007) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, antara lain pendidikan, motivasi, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, iklim dan lingkungan kerja, teknologi, sarana produksi, jaminan sosial, manajemen dan kesempatan berprestasi. Dalam analisis manajemen sumber daya manusia produktivitas karyawan merupakan variabel tergantung atau dipengaruhi banyak yang ditentukan oleh banyak faktor (Sedarmayanti, 2001:57). Bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut yaitu, sikap

kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dengan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan kewiraswastaan.

Efisiensi tenaga kerja atau efisiensi kerja merupakan suatu prinsip dasar untuk melakukan setiap kegiatan maupun beban tugas dengan tujuan untuk dapat memperoleh hasil yang dikehendaki dengan melakukan usaha yang seminimal mungkin sesuai dengan standar yang ada namun tetap membrikan hasil yang optimal. Menurut Sedarmayanti (2001:112) Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal.

Menurut Drs. Soekarno K. dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen, bahwa yang dimaksud dengan efisiensi ialah perbandingan yang terbaik antara masukan (“input”) dan keluaran (“output”), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara “pengeluaran” dan “pendapatan.” Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektifitas, dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna yang artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Selanjutnya menurut The Liang Gie, dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran Modern, bahwa pengertian efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. Selanjutnya bilamana suatu kerja dianalisis, dapatlah dibedakan dalam dua segi, yaitu intinya dan susunannya. Intinya ialah rangkaian aktivitas-aktifitasnya itu sendiri yang wujudnya mengikuti tujuan yang hendak

dicapai, sedang yang dimaksud dengan susunannya ialah cara-caranya rangkaian aktivitas-aktivitas itu dilakukan. Jadi, setiap kerja tentu mencakup sesuatu cara tertentu dalam melakukan tiap-tiap aktivitas, apapun tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan kerja itu.

Bekerja dengan efisiensi adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Dengan menggunakan cara kerja yang sederhana, penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas serta menghemat gerak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengan efisien dan memperoleh hasil yang memuaskan. Sehingga, efisiensi merupakan salah satu faktor pokok yang erat kaitannya dalam memberikan pengaruh terhadap produktivitas seseorang. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang mampu bekerja secara efisien maka akan mempengaruhi tingkat produktivitas dirinya. Semakin seseorang itu dapat melaksanakan tugas dengan efisien maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan dilakukan guna mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara efisiensi kerja dengan produktivitas kerja pada anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya, hubungan antara efisiensi kerja dengan produktivitas kerja pada anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan peneliti sehubungan dengan efisiensi kerja dengan produktivitas kerja.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi bagi pengembangan penerapan disiplin ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca maupun untuk penelitian dibidang yang sama.
 - b. Bagi organisasi lain baik pemerintah maupun swasta sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki. Jika hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara efisiensi kerja dengan produktivitas kerja maka hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga mendapat keuntungan ganda yaitu untuk organisasi maupun sumber daya manusia itu sendiri.